

# Ketahanan Pangan

sebagai Pilar Stabilitas  
Ekonomi dan Sosial



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

11 Maret 2026

## **KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PILAR STABILITAS EKONOMI DAN SOSIAL**

### **Abstrak**

Makalah ini membahas ketahanan pangan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi dan sosial, dengan menempatkannya bukan semata sebagai isu produksi pertanian, melainkan sebagai persoalan sistemik yang mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan gizi, dan stabilitas pasokan dari waktu ke waktu. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh inflasi pangan, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian geopolitik, ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Data mutakhir menunjukkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, dan sekitar 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya menyangkut suplai, tetapi juga daya beli, distribusi, dan kualitas konsumsi. ([FAOHome](#))

Makalah ini menegaskan bahwa ketahanan pangan berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli rumah tangga, kemiskinan, produktivitas tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, serta kohesi sosial. Dalam konteks Indonesia, urgensi tersebut terlihat dari peran besar sektor pangan terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Pada Februari 2026 inflasi tahunan tercatat 4,76 persen,

sementara Pemerintah dan Bank Indonesia secara eksplisit menempatkan pengendalian inflasi pangan dan harga bergejolak sebagai prioritas kebijakan. Pada sisi lain, Indonesia menunjukkan kemajuan produksi padi dan beras pada 2025, namun tantangan tetap muncul dalam bentuk distribusi, disparitas harga, kemiskinan perdesaan, dan masalah gizi seperti stunting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara argumentatif, makalah ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah pilar stabilitas ekonomi karena menopang inflasi yang rendah, konsumsi rumah tangga yang sehat, dan pendapatan produsen pangan; sekaligus pilar stabilitas sosial karena menentukan rasa aman masyarakat, kualitas gizi antargenerasi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Dengan demikian, strategi ketahanan pangan yang efektif harus melampaui pendekatan sempit berbasis produksi tunggal, lalu bergerak menuju sistem pangan yang tangguh, beragam, bergizi, inklusif, efisien secara logistik, dan adaptif terhadap risiko iklim. ([World Bank](#))

**Kata kunci:** ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, inflasi pangan, kemiskinan, gizi, Indonesia

---

## 1. Pendahuluan

Dalam studi pembangunan, pangan selalu menempati posisi yang unik. Ia adalah kebutuhan biologis dasar, komoditas ekonomi yang sangat sensitif, sekaligus simbol legitimasi negara. Negara dapat membangun industri, teknologi digital, atau infrastruktur besar, tetapi apabila rakyat menghadapi kelangkaan pangan, lonjakan harga bahan pokok, atau kualitas gizi yang memburuk, maka stabilitas ekonomi dan sosial akan segera terancam. Karena itu, ketahanan pangan harus dibaca sebagai isu strategis lintas sektor: pertanian, perdagangan, logistik, kesehatan, perlindungan sosial, fiskal, dan tata kelola. Definisi yang banyak dipakai

secara internasional menegaskan bahwa ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat, dengan empat dimensi utama berupa ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. ([World Bank](#))

Kebutuhan untuk menempatkan pangan dalam pusat pembahasan ekonomi dan sosial makin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025* memperlihatkan bahwa perbaikan global memang mulai terjadi, namun masih sangat jauh dari aman. Pada 2024 sekitar 673 juta orang masih menghadapi kelaparan; sekitar 28 persen populasi dunia atau hampir 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat; dan 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. FAO juga menekankan bahwa inflasi pangan yang tinggi telah mengikis daya beli dan memperlemah kemampuan rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah, untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi konsumsi gizi yang lebih baik. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, urgensi tersebut tidak kalah nyata. Sebagai negara besar dengan penduduk yang sangat banyak, keragaman geografis yang luas, dan struktur sosial-ekonomi yang masih menghadapi kesenjangan, Indonesia memerlukan sistem pangan yang bukan hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga stabil, terjangkau, dan bergizi. Ketika harga pangan bergejolak, dampaknya sangat cepat menjalar pada daya beli, kemiskinan, dan persepsi masyarakat terhadap kualitas kebijakan. Pada Februari 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 4,76 persen, sedangkan pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan sasaran pengendalian inflasi umum  $2,5 \pm 1$  persen dan inflasi harga bergejolak 3,0–5,0 persen untuk 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa pangan berada di jantung manajemen stabilitas makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan secara akademik mengapa ketahanan pangan dapat disebut sebagai pilar stabilitas ekonomi dan sosial. Uraian dibangun melalui empat alur. Pertama, menjelaskan kerangka konseptual ketahanan pangan. Kedua, menganalisis hubungan pangan dengan stabilitas ekonomi, terutama melalui inflasi, daya beli, pertumbuhan, dan kemiskinan. Ketiga, menelaah kaitan pangan dengan stabilitas sosial, terutama lewat gizi, kesehatan, kerentanan rumah tangga, dan kohesi sosial. Keempat, mengaitkan kerangka tersebut dengan dinamika global dan konteks Indonesia mutakhir, lalu merumuskan implikasi kebijakan. Dengan demikian, makalah ini berupaya menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan isu sektoral yang sempit, melainkan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. ([World Bank](#))

---

## 2. Landasan Konseptual Ketahanan Pangan

Secara teoretis, ketahanan pangan berkembang dari pemahaman yang semula menekankan ketersediaan fisik menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Pada tahap awal, diskusi tentang pangan banyak terfokus pada produksi nasional dan stok komoditas utama. Akan tetapi, pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa masyarakat dapat tetap lapar meskipun pangan tersedia secara agregat, karena masalah sesungguhnya bisa terletak pada distribusi, harga, pendapatan, kualitas konsumsi, atau kerentanan terhadap guncangan. Karena itu, definisi modern tentang ketahanan pangan menempatkan empat pilar secara bersamaan: *availability* (ketersediaan), *access* (akses), *utilization* (pemanfaatan atau penggunaan gizi), dan *stability* (stabilitas dari ketiga unsur sebelumnya). ([World Bank](#))

Dimensi ketersediaan berkaitan dengan apakah pangan secara fisik ada dalam jumlah yang memadai. Ini mencakup produksi domestik, impor,

cadangan, dan kemampuan sistem distribusi untuk memindahkan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Dalam banyak diskusi publik, dimensi ini sering mendominasi karena paling mudah diukur melalui angka panen, stok, atau volume impor. Namun secara akademik, ketersediaan baru bermakna apabila diikuti oleh akses yang memadai. Akses berarti rumah tangga memiliki kemampuan ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan. Sebuah keluarga miskin di perkotaan mungkin tinggal dekat pasar, tetapi tetap tidak tahan pangan jika harga terlalu tinggi bagi pendapatannya. Dalam arti ini, pangan dan daya beli tidak bisa dipisahkan. ([World Bank](#))

Dimensi ketiga, yaitu pemanfaatan atau utilisasi, mengingatkan bahwa tidak semua konsumsi pangan otomatis menghasilkan kesehatan yang baik. Yang menentukan bukan hanya jumlah kalori, tetapi juga mutu, keberagaman, keamanan, pola konsumsi, sanitasi, dan kondisi kesehatan individu. Itulah sebabnya diskusi pangan modern makin menekankan diet sehat dan kualitas gizi, bukan sekadar ketersediaan bahan pokok murah. SOFI 2025 bahkan menempatkan keterjangkauan diet sehat dan keberagaman pangan anak serta perempuan sebagai indikator penting, karena ketahanan pangan yang sesungguhnya harus mengarah pada kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. ([FAOHome](#))

Dimensi keempat adalah stabilitas. Pilar ini sering menjadi pembeda antara sistem pangan yang tampak baik di atas kertas dan sistem pangan yang benar-benar tangguh. Stabilitas berarti ketersediaan, akses, dan utilisasi tidak boleh bergantung pada kondisi normal semata; ketiganya harus tetap bertahan di bawah tekanan inflasi, gangguan cuaca, bencana, konflik, atau volatilitas pasar. Dalam pengertian ini, ketahanan pangan sangat terkait dengan resiliensi sistem. Negara yang hanya kuat pada masa panen raya, tetapi rapuh saat banjir, kekeringan, atau gangguan logistik, belum dapat disebut memiliki ketahanan pangan yang kokoh. ([World Bank](#))

Kerangka empat dimensi tersebut juga membantu menjelaskan mengapa ketahanan pangan harus dikelola lintas sektor. Kementerian pertanian saja tidak cukup, sebab produksi tidak akan menyelesaikan akses bila pendapatan rumah tangga lemah; perdagangan tidak akan cukup bila distribusi buruk; kebijakan sosial tidak akan cukup bila tidak ada pasokan; dan pelayanan kesehatan tidak akan optimal bila kualitas pangan rumah tangga rendah. Dengan kata lain, pangan adalah simpul yang menghubungkan pertanian, transportasi, perdagangan, kesehatan masyarakat, fiskal, dan tata kelola. Oleh sebab itu, ketahanan pangan yang efektif mensyaratkan koordinasi antarlembaga, data yang baik, dan kapasitas negara untuk bertindak secara terpadu. ([Bank Indonesia](#))

---

### **3. Ketahanan Pangan dalam Perspektif Stabilitas Ekonomi**

#### **3.1 Pangan, inflasi, dan daya beli**

Hubungan paling langsung antara ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi tampak melalui inflasi. Pangan adalah komponen pengeluaran yang sangat mendasar bagi rumah tangga. Ketika harga pangan naik, terutama komoditas yang dikonsumsi setiap hari seperti beras, telur, minyak goreng, cabai, atau bawang, maka penyesuaian belanja rumah tangga terjadi segera. Rumah tangga tidak mudah menunda konsumsi pangan, sehingga lonjakan harga akan langsung menggerus pendapatan riil. Bagi kelompok miskin dan rentan, efek ini lebih berat karena proporsi pengeluaran untuk makanan umumnya lebih besar daripada kelompok menengah atas. Inilah sebabnya inflasi pangan hampir selalu bersifat regresif.

Secara global, kerentanan ini masih sangat nyata. World Bank pada *Food Security Update* Januari 2025 mencatat bahwa inflasi harga pangan domestik di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah tetap

tinggi; lebih dari 72,2 persen negara berpendapatan rendah masih mengalami inflasi pangan di atas 5 persen. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa pangan terus menjadi sumber tekanan biaya hidup bahkan ketika inflasi umum mulai menurun di sejumlah negara. Apabila inflasi pangan bertahan tinggi, maka kebijakan moneter menghadapi dilema: menahan inflasi tanpa terlalu menekan pertumbuhan. Dari sini terlihat bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari stabilitas makro, bukan sekadar isu kesejahteraan mikro.

FAO memperkuat pembacaan tersebut dalam SOFI 2025 dengan menekankan bahwa sejak 2020 inflasi pangan telah melampaui inflasi umum setiap tahun. Ini menandakan bahwa sistem agrifood memiliki kerentanan struktural yang khas: sangat sensitif terhadap cuaca, energi, logistik, dan kebijakan perdagangan. Ketika inflasi pangan menggerus daya beli, rumah tangga sering kali tidak hanya mengurangi jumlah konsumsi, tetapi juga menurunkan kualitasnya. Mereka beralih dari pangan yang lebih beragam dan bergizi menuju pilihan yang lebih murah dan kurang sehat. Dengan demikian, inflasi pangan bukan hanya persoalan ekonomi jangka pendek, melainkan juga ancaman bagi gizi dan kualitas SDM jangka panjang. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, hubungan ini sangat relevan. Pada Februari 2026, BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 4,76 persen dan inflasi bulanan 0,68 persen. Di tingkat kebijakan, pemerintah dan Bank Indonesia kemudian menegaskan sasaran inflasi umum  $2,5 \pm 1$  persen dan inflasi harga bergejolak 3,0–5,0 persen pada 2026. Artinya, komoditas pangan bergejolak diperlakukan sebagai sumber risiko makro yang memerlukan intervensi khusus. Di sini ketahanan pangan berfungsi sebagai jangkar stabilitas harga: ketika pasokan terjaga, distribusi lancar, dan cadangan efektif, maka tekanan inflasi lebih mudah dikendalikan dan ekspektasi pasar menjadi lebih stabil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **3.2 Pangan, pertumbuhan, dan permintaan domestik**

Selain memengaruhi inflasi, ketahanan pangan juga menopang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian seperti Indonesia, konsumsi domestik adalah penyangga utama pertumbuhan. Karena pangan merupakan komponen rutin dan besar dalam pengeluaran rumah tangga, kestabilan harga pangan ikut menentukan apakah konsumsi masyarakat dapat terus berjalan sehat atau justru terseret ke arah defensif. Bila harga pangan stabil, rumah tangga mempunyai ruang untuk membelanjakan pendapatan pada pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kegiatan produktif lainnya. Sebaliknya, bila sebagian besar pendapatan terserap untuk makan, efek berganda ke sektor-sektor lain akan melemah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada triwulan III-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan, menunjukkan bahwa permintaan domestik masih relatif kokoh. Dari sisi lain, BPS juga melaporkan bahwa ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen. Stabilitas konsumsi semacam ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara menjaga gejolak biaya hidup, termasuk pangan. Perekonomian mungkin tampak tumbuh dari sisi agregat, tetapi tanpa pengelolaan pangan yang baik, pertumbuhan itu mudah kehilangan kualitas karena rumah tangga bawah menjadi sangat rentan terhadap guncangan harga kebutuhan pokok. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketahanan pangan juga menopang pertumbuhan dari sisi penawaran karena sektor pertanian masih memainkan peran penting sebagai basis nafkah dan penyedia bahan baku. BPS mencatat tambahan tenaga kerja sebesar 0,49 juta orang pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam setahun terakhir hingga Agustus 2025. Artinya, sistem pangan tidak hanya memberi makan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pekerjaan, pendapatan desa, dan permintaan terhadap input produksi.

Jika sektor ini terguncang berat oleh iklim, distribusi, atau harga yang tidak menguntungkan produsen, maka dampaknya tidak hanya pada pasokan pangan, tetapi juga pada kesempatan kerja dan pendapatan regional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **3.3 Pangan, kemiskinan, dan kerentanan**

Hubungan antara pangan dan kemiskinan sangat erat. Kenaikan harga pangan dapat mendorong rumah tangga yang rentan jatuh menjadi miskin, sementara rumah tangga miskin yang sudah ada akan semakin dalam tingkat deprivasi materialnya. Mekanismenya jelas: ketika biaya untuk memenuhi kebutuhan makan naik, rumah tangga dengan cadangan pendapatan tipis harus memangkas pengeluaran lain. Pengorbanan itu biasanya terjadi pada pendidikan, kesehatan, kualitas gizi, dan aset produktif. Dalam jangka pendek, hal ini memperburuk kesejahteraan; dalam jangka panjang, ia memperkuat transmisi kemiskinan antargenerasi. ([Open Knowledge Portal](#))

Data Indonesia menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, kerentanan tetap besar. Pada September 2025 persentase penduduk miskin tercatat 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Yang penting untuk dicermati, kemiskinan perdesaan masih jauh lebih tinggi, yakni 10,72 persen, dibanding 6,60 persen di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan paradoks pembangunan pangan: wilayah yang menjadi basis produksi sering kali tetap lebih rentan secara sosial-ekonomi. Bila petani menghadapi biaya input tinggi, akses pasar lemah, dan risiko iklim besar, maka ketahanan pangan nasional akan bertumpu pada rumah tangga produsen yang justru rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, ketahanan pangan yang sejati harus melindungi dua sisi sekaligus: konsumen dan produsen. Kebijakan yang hanya menekan harga di tingkat konsumen tanpa menjaga insentif produsen dapat menciptakan ketahanan semu. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu

menekankan harga produsen tanpa memikirkan daya beli masyarakat juga berisiko sosial. Negara perlu menata keseimbangan tersebut melalui produktivitas, efisiensi logistik, cadangan pangan, subsidi yang tepat sasaran, perlindungan sosial, dan tata niaga yang sehat. Dalam kerangka ini, ketahanan pangan menjadi instrumen untuk menahan pelebaran kemiskinan sekaligus untuk menjaga keberlanjutan sektor produksi. ([Bank Indonesia](#))

---

#### **4. Ketahanan Pangan dalam Perspektif Stabilitas Sosial**

##### **4.1 Gizi, kesehatan, dan modal manusia**

Stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh keamanan politik, tetapi juga oleh kualitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini, pangan berperan sebagai pembentuk dasar kesehatan dan modal manusia. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada awal kehidupan cenderung menghadapi hambatan perkembangan kognitif, daya tahan tubuh yang lebih rendah, dan performa pendidikan yang lebih lemah. Maka, ketika ketahanan pangan dibahas hanya dari sudut stok atau harga, ada dimensi sosial yang luput: kualitas generasi masa depan. Pangan yang cukup tetapi miskin protein, vitamin, dan mineral dapat menciptakan masyarakat yang secara formal "makan", tetapi tidak benar-benar sehat dan produktif. ([FAOHome](#))

SOFI 2025 menggarisbawahi bahwa persoalan malnutrisi global bersifat campuran: ada kemajuan terbatas pada stunting anak, tetapi pemborosan (*wasting*) stagnan, anemia perempuan usia 15–49 meningkat, dan keberagaman diet anak maupun perempuan masih rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas diet adalah unsur pokok ketahanan pangan. Dunia tidak lagi cukup hanya berbicara tentang kalori; perhatian harus bergeser ke keterjangkauan diet sehat,

keberagaman konsumsi, dan keterhubungan antara sistem pangan dengan hasil gizi. ([FAOHome](#))

Indonesia menghadapi isu yang sangat serupa. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Ini adalah kemajuan penting, tetapi angkanya tetap cukup tinggi untuk ukuran negara yang sedang membangun daya saing SDM. Stunting bukan semata persoalan kesehatan individu; ia adalah indikator sosial yang mencerminkan kualitas konsumsi rumah tangga, kesehatan ibu-anak, sanitasi, pendidikan, dan kemampuan negara menjangkau kelompok rentan. Dengan demikian, ketahanan pangan harus dibaca sebagai prasyarat bagi pembangunan manusia yang berkualitas. ([BKPK Kemenkes](#))

#### **4.2 Pangan, rasa aman, dan kohesi sosial**

Pada level rumah tangga, pangan berkaitan langsung dengan rasa aman. Keluarga yang tidak yakin apakah esok hari dapat membeli bahan pokok akan hidup dalam tekanan psikologis yang tinggi. Ketidakpastian seperti ini dapat mendorong strategi bertahan yang merugikan, misalnya mengurangi frekuensi makan, membeli pangan berkualitas rendah, menarik anak dari pendidikan untuk membantu ekonomi keluarga, atau menjual aset produktif. Akumulasi praktik semacam itu melemahkan kohesi sosial karena masyarakat terus hidup dalam logika krisis. Dalam jangka panjang, kualitas relasi sosial di komunitas juga terpengaruh oleh tekanan ekonomi berbasis pangan. ([FAOHome](#))

World Bank bahkan memiliki *Food Riot Radar* yang secara khusus memantau episode kerusuhan sosial terkait instabilitas harga pangan. Kehadiran instrumen tersebut menunjukkan bahwa ketidakstabilan pangan tidak dipandang sebagai isu privat rumah tangga, melainkan juga sebagai faktor risiko sosial dan politik. Dalam sejarah modern, lonjakan harga bahan pokok berkali-kali menjadi pemicu ketegangan sosial. World Bank juga mencatat bahwa kenaikan harga pangan pada

2007–2008 memicu keresahan sosial atau konflik sipil di lebih dari 40 negara. Karena itu, dari sudut stabilitas sosial, pangan adalah variabel keamanan manusia sekaligus keamanan negara. ([World Bank](#))

Di negara demokratis, dimensi ini menjadi lebih penting karena legitimasi negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga kebutuhan paling dasar rakyat. Ketika harga pangan melonjak dan respons kebijakan lambat, masyarakat tidak menafsirkan masalah itu hanya sebagai gejala ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan tata kelola. Sebaliknya, ketika negara mampu menghadirkan operasi pasar, distribusi cadangan, bantuan sosial, dan komunikasi kebijakan yang jelas, kepercayaan publik cenderung menguat. Dengan demikian, ketahanan pangan juga menopang kohesi sosial melalui jalur kepercayaan institusional. ([Bank Indonesia](#))

### **4.3 Pangan dan keadilan sosial**

Dimensi sosial lain dari ketahanan pangan adalah keadilan. Sistem pangan yang baik bukan hanya menjamin bahwa pangan tersedia di pasar nasional, tetapi juga memastikan bahwa kelompok miskin, daerah terpencil, perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang terpapar bencana tidak tertinggal. FAO menekankan bahwa beban kerawanan pangan global tidak dibagi secara merata; pedesaan dan perempuan cenderung menanggung beban lebih berat. Ini menuntut pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap distribusi, bukan semata agregat. Ketahanan pangan yang tidak adil akan melahirkan stabilitas semu: angka nasional tampak aman, tetapi kelompok tertentu tetap hidup dalam kerentanan kronis. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, disparitas wilayah dan kapasitas logistik membuat dimensi keadilan ini sangat relevan. Negara kepulauan tidak cukup mengandalkan satu mekanisme pasokan nasional, karena tantangan tiap daerah berbeda. Wilayah surplus bisa tetap bersebelahan dengan wilayah defisit akibat keterbatasan konektivitas, pascapanen, dan

informasi pasar. Karena itu, ketahanan pangan yang adil harus memperhitungkan akses antardaerah, dukungan untuk daerah rawan, dan penguatan pangan lokal sesuai ekologi masing-masing wilayah. Di sini, keadilan sosial bukan pelengkap moral, melainkan syarat efektivitas sistem pangan itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

---

## **5. Dinamika Global Kontemporer: Mengapa Ketahanan Pangan Makin Strategis**

### **5.1 Kerawanan pangan global dan keterjangkauan diet sehat**

Gambaran global terkini memperlihatkan bahwa dunia belum keluar dari tekanan pangan pascapandemi. Pada 2024, sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, dan hampir 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat. Pada saat yang sama, 2,6 miliar orang tidak mampu membeli diet sehat. Statistik ini sangat penting karena membuktikan bahwa persoalan pangan dunia tidak dapat direduksi menjadi soal produksi total global. Bahkan ketika pasokan global secara agregat tersedia, distribusi pendapatan, inflasi, dan biaya diet sehat tetap membuat miliaran orang tidak memperoleh konsumsi yang memadai. ([FAOHome](#))

FAO juga menunjukkan adanya disparitas regional yang tajam. Perbaikan terjadi di beberapa kawasan Asia dan Amerika Latin, tetapi Afrika dan Asia Barat tetap menghadapi tekanan berat. Gambaran ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh konteks struktural: konflik, kapasitas fiskal, kerentanan iklim, logistik, dan stabilitas politik. Karena itu, pembahasan pangan pada abad ke-21 tidak bisa lagi dipisahkan dari isu ketidaksetaraan global dan ketimpangan pembangunan antarkawasan. ([FAOHome](#))

### **5.2 Inflasi pangan sebagai tantangan struktural**

Salah satu temuan paling penting dari SOFI 2025 adalah bahwa sejak 2020 inflasi pangan telah melampaui inflasi umum setiap tahun. Hal ini berarti sistem agrifood memiliki tekanan biaya dan volatilitas yang lebih besar daripada banyak sektor lain. Pangan sangat sensitif terhadap harga energi, pupuk, transportasi, gangguan cuaca, dan reaksi kebijakan perdagangan. Ketika berbagai faktor ini bergerak bersamaan, harga pangan mudah melonjak dan dampaknya langsung terasa pada rumah tangga miskin. Maka, inflasi pangan harus dilihat sebagai persoalan struktural yang memerlukan respons makro, bukan sekadar operasi pasar sesaat. ([FAOHome](#))

World Bank juga memperlihatkan bahwa tekanan ini tidak berhenti pada level global. Di banyak negara berpendapatan rendah, inflasi pangan domestik tetap tinggi. Karena harga pangan adalah penghubung paling langsung antara guncangan global dan kehidupan rumah tangga, maka ketahanan pangan nasional memerlukan kapasitas untuk “mengisolasi” sebagian dampak guncangan eksternal melalui produksi, cadangan, kebijakan perdagangan yang hati-hati, dan perlindungan sosial. Negara yang gagal membangun kapasitas ini akan sangat mudah diseret oleh volatilitas global.

### **5.3 Perubahan iklim dan risiko sistemik**

Tantangan pangan kontemporer juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan iklim. IPCC menyatakan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa perubahan iklim telah mengurangi ketahanan pangan dan memengaruhi keamanan air. Pada sisi lain, WMO menegaskan bahwa 2025 menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan suhu rata-rata global sekitar 1,44°C di atas rata-rata 1850–1900, dan sebagian dataset menempatkannya sebagai tahun terpanas kedua, sementara lainnya sebagai ketiga. Implikasi dari fakta ini bagi pangan sangat besar: pola hujan berubah, kejadian ekstrem meningkat,

produktivitas tanaman tertentu menurun, dan risiko pascapanen membesar.

IPCC juga menegaskan bahwa perubahan iklim berdampak negatif pada keempat pilar ketahanan pangan sekaligus: ketersediaan, akses, utilisasi, dan stabilitas. Artinya, krisis iklim tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga menaikkan harga, mengganggu kualitas pangan, memperburuk distribusi, dan meningkatkan kerentanan jangka panjang. Maka, strategi ketahanan pangan modern harus selalu memasukkan adaptasi iklim sebagai komponen inti, bukan tambahan opsional. Di sinilah konsep pangan berkelanjutan dan pangan tangguh bertemu.

([IPCC](#))

#### **5.4 Gangguan perdagangan dan gejolak geopolitik**

Selain iklim, sistem pangan global juga rentan terhadap pembatasan ekspor, perang, dan disrupsi logistik. Pengalaman krisis 2007–2008 menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan global dapat diperburuk oleh kebijakan proteksionis, terutama ketika negara-negara pengeksport bereaksi dengan pembatasan pasokan ke pasar internasional. World Bank mencatat bahwa kenaikan tajam harga pangan kala itu memicu keresahan sosial di banyak negara dan mendorong berbagai intervensi yang dalam beberapa kasus justru memperburuk volatilitas global. Pelajaran ini masih relevan hingga kini: ketahanan pangan nasional perlu diperkuat, tetapi bukan dengan kebijakan tertutup yang justru meningkatkan risiko sistemik global. ([World Bank](#))

---

## **6. Ketahanan Pangan Indonesia: Capaian, Kerentanan, dan Respons Kebijakan**

### **6.1 Capaian produksi dan ruang optimisme**

Indonesia memiliki alasan untuk optimistis. BPS melaporkan bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibanding 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pada sisi produksi terdapat perbaikan yang berarti. Secara kebijakan, data semacam ini memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk memperkuat cadangan, mengelola distribusi, dan menahan gejolak harga. Namun, dari sudut pandang akademik, capaian produksi hanya merupakan salah satu prasyarat, bukan jaminan otomatis bagi ketahanan pangan penuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Produksi yang meningkat tetap dapat disertai ketidakstabilan apabila distribusi, penyimpanan, dan transmisi harga tidak berjalan baik. Dalam negara kepulauan, persoalan logistik berpotensi menggerus manfaat kenaikan produksi. Wilayah sentra dapat mengalami harga jatuh di tingkat produsen, sementara wilayah konsumen masih menghadapi harga tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan produksi harus dibaca bersama indikator lain: inflasi pangan, disparitas harga antarwilayah, kekuatan cadangan, dan efektivitas intervensi pasar. Di sinilah analisis ketahanan pangan menuntut pendekatan sistem, bukan pendekatan sektoral yang terlalu sempit. ([Bank Indonesia](#))

## **6.2 Inflasi pangan dan pengendalian harga**

Meskipun produksi membaik, Indonesia tetap menghadapi risiko gejolak harga. Pada Februari 2026 inflasi tahunan mencapai 4,76 persen. Menyadari pentingnya pangan dalam pembentukan inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan perlunya menjaga inflasi harga bergejolak dalam kisaran 3,0–5,0 persen. Kebijakan yang ditempuh tidak hanya bersifat makro, tetapi juga sangat operasional: menjaga ketersediaan pasokan antardaerah, memperlancar distribusi, memperkuat komunikasi kebijakan, dan melindungi daya beli masyarakat. Ini mencerminkan pengakuan resmi bahwa stabilitas harga

nasional sangat bergantung pada performa sistem pangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia pada Februari 2026 memperkenalkan GPIPS sebagai strategi baru pengendalian inflasi dan pangan. Program ini menegaskan tiga fokus: penguatan sisi hulu guna menjamin pasokan terutama menghadapi cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, dan penguatan sinergi pusat-daerah. GPIPS juga menekankan adaptasi iklim, perlindungan usaha tani dan pascapanen, serta efisiensi logistik pangan. Pendekatan tersebut penting karena ia menempatkan pangan sebagai sistem yang harus dikelola dari produksi sampai distribusi, bukan hanya ditangani setelah harga naik. ([Bank Indonesia](#))

### **6.3 Kemiskinan, desa, dan kerentanan produsen pangan**

Seperti telah diuraikan, angka kemiskinan Indonesia menurun menjadi 8,25 persen pada September 2025, tetapi kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Ini penting karena basis produksi pangan utama berada di desa. Artinya, ketahanan pangan nasional disangga oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi masih lebih rentan. Ketika produsen pangan memiliki daya tahan keuangan yang lemah, mereka lebih mudah terpukul oleh gagal panen, fluktuasi harga, atau kenaikan biaya input. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat regenerasi petani dan mempersempit fondasi produksi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, pembicaraan tentang ketahanan pangan nasional tidak boleh berhenti pada konsumen. Produsen harus dipandang sebagai aktor sentral yang perlu memperoleh perlindungan dari sisi pembiayaan, irigasi, asuransi, teknologi, pascapanen, dan akses pasar. Ketika petani lebih sejahtera dan lebih tangguh, maka kestabilan pasokan nasional juga akan lebih kuat. Dengan kata lain, keadilan ekonomi bagi produsen

bukan sekadar isu pemerataan, tetapi merupakan syarat bagi keberlanjutan ketahanan pangan itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

#### **6.4 Gizi dan kualitas ketahanan pangan**

Peningkatan produksi beras tidak otomatis menyelesaikan masalah gizi. Penurunan stunting Indonesia menjadi 19,8 persen pada 2024 adalah kabar baik, tetapi tetap mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional masih harus bergerak dari paradigma kecukupan menuju paradigma kualitas. Gizi buruk, anemia, diet yang tidak beragam, dan konsumsi pangan ultra murah yang miskin mikronutrien dapat tetap terjadi di tengah stok bahan pokok yang relatif aman. Karena itu, indikator keberhasilan pangan tidak cukup hanya diukur dari volume panen atau tingkat harga, melainkan juga dari perbaikan diet dan kesehatan masyarakat. ([BKPK Kemenkes](#))

Pendekatan seperti ini menuntut kebijakan yang menghubungkan pangan dengan kesehatan publik. Program intervensi gizi, edukasi konsumsi, penguatan protein hewani, perbaikan akses sayur dan buah, serta integrasi dengan agenda kesehatan ibu-anak menjadi sangat penting. Jika tidak, negara berisiko menghasilkan “ketahanan pangan” yang kuat secara statistik komoditas, tetapi lemah secara kualitas manusia. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, hal itu berarti fondasi pertumbuhan akan tetap rapuh. ([FAOHome](#))

#### **6.5 Cadangan pangan, SPHP, dan bantuan sosial**

Salah satu instrumen utama stabilisasi pangan di Indonesia adalah pengelolaan cadangan dan distribusi intervensi. Pada Januari 2026, Badan Pangan Nasional menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah sekitar 3,3 juta ton dan memperkirakan dapat mencapai 5–6 juta ton pada sekitar Mei–Juni 2026 apabila penyerapan berjalan sesuai rencana. Dari perspektif kebijakan, angka ini penting bukan hanya karena menunjukkan ketersediaan fisik, tetapi karena cadangan membentuk

kredibilitas intervensi negara di mata pasar. Semakin kuat posisi stok, semakin besar kemampuan pemerintah menahan ekspektasi kenaikan harga. ([Badan Pangan Nasional](#))

Di samping itu, program SPHP beras yang diperpanjang hingga akhir Februari 2026 menunjukkan fungsi negara sebagai penyangga jangka pendek. Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan SPHP telah mencapai 902,7 ribu ton, dan Bapanas menyebut program ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan serta menekan gejolak harga menjelang Ramadan. Intervensi semacam ini penting terutama pada saat momentum musiman berpotensi memperkuat tekanan harga. Namun, efektivitas jangka panjangnya tetap bergantung pada integrasi dengan perbaikan sisi hulu dan logistik. ([Badan Pangan Nasional](#))

Program bantuan pangan beras juga berfungsi sebagai *automatic stabilizer* sosial. Pada Juli 2025, Bapanas menugaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk dua bulan. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa bantuan semacam ini ditujukan untuk meredam inflasi dan menopang ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam kerangka ekonomi-politik, bantuan pangan semacam ini bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi instrumen menjaga permintaan dasar, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan publik pada saat daya beli tertekan. ([Badan Pangan Nasional](#))

---

## **7. Implikasi Kebijakan: Dari Ketahanan Pangan Menuju Stabilitas yang Berkelanjutan**

Pelajaran utama dari dinamika global dan pengalaman Indonesia adalah bahwa ketahanan pangan tidak boleh diperlakukan sebagai agenda parsial. Sistem pangan yang kokoh memerlukan integrasi kebijakan

produksi, distribusi, gizi, perlindungan sosial, dan tata kelola data. Tanpa integrasi tersebut, negara akan cenderung bergerak secara reaktif: panik saat harga naik, impor saat stok ketat, dan mengandalkan operasi pasar tanpa perbaikan struktur. Pendekatan reaktif dapat membantu jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menopang stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. ([Bank Indonesia](#))

Pertama, penguatan produksi harus diarahkan pada produktivitas yang tahan iklim, bukan sekadar ekspansi output. Perubahan iklim telah terbukti mengurangi ketahanan pangan dan memengaruhi keamanan air. Karena itu, investasi pada benih adaptif, irigasi yang efisien, perlindungan usaha tani, sistem peringatan dini, dan teknologi pascapanen harus menjadi prioritas. Produksi yang tinggi tetapi rentan terhadap satu musim cuaca ekstrem tidak cukup menopang stabilitas jangka panjang.

Kedua, logistik pangan perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan stabilitas, bukan sekadar proyek infrastruktur. Bank Indonesia sendiri menekankan pentingnya distribusi antardaerah, terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit, sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan. Ini berarti efisiensi transportasi, gudang, *cold chain*, pasar induk, dan informasi stok harus ditingkatkan secara sistematis. Dalam negara kepulauan, biaya logistik yang tinggi tidak hanya mengurangi efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan akses. ([Bank Indonesia](#))

Ketiga, ukuran keberhasilan pangan harus diperluas dari swasembada sempit menuju keterjangkauan diet sehat. FAO menunjukkan bahwa 2,6 miliar orang di dunia masih tidak mampu membeli diet sehat, dan hanya sebagian anak serta perempuan yang memenuhi standar keberagaman diet minimum. Dengan demikian, kebijakan pangan Indonesia juga perlu bergeser dari fokus yang terlalu kuat pada satu komoditas menuju diversifikasi sumber karbohidrat, protein, sayur, buah, dan pangan lokal.

Diversifikasi tidak hanya baik bagi gizi, tetapi juga menyebar risiko produksi dan memperluas basis ekonomi daerah. ([FAOHome](#))

Keempat, perlindungan sosial berbasis pangan harus diperlakukan sebagai instrumen permanen ketahanan sosial. Bantuan pangan, intervensi gizi, dan perlindungan rumah tangga rentan tidak boleh hanya muncul saat krisis. Dalam masyarakat dengan tingkat kerentanan yang masih tinggi, jaring pengaman yang baik membantu mencegah guncangan harga berubah menjadi penurunan kualitas hidup yang permanen. Dengan kata lain, perlindungan sosial bukan sekadar belas kasihan fiskal, tetapi investasi untuk mencegah biaya sosial yang lebih mahal di masa depan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Kelima, tata kelola pangan harus berbasis data dan koordinasi lintas lembaga. Ketika keputusan mengenai stok, distribusi, impor, SPHP, bantuan pangan, dan perlindungan petani diambil tanpa data yang cukup, kebijakan mudah kehilangan presisi. Karena itulah BI, Bapanas, BPS, pemerintah daerah, dan lembaga sektor lain memerlukan neraca pangan dan sistem informasi yang lebih kuat. Ketahanan pangan yang kuat sesungguhnya adalah hasil dari kapasitas negara untuk membaca risiko lebih awal dan merespons secara terkoordinasi. ([Bank Indonesia](#))

Akhirnya, ketahanan pangan perlu ditempatkan dalam paradigma pembangunan jangka panjang. Negara yang kuat pangannya memperoleh keuntungan ganda: ia lebih tangguh terhadap guncangan eksternal dan memiliki fondasi sosial yang lebih tenang untuk membangun sektor-sektor lain. Pangan yang aman, terjangkau, dan bergizi bukan hanya menurunkan inflasi atau kemiskinan, tetapi juga menyiapkan modal manusia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Dalam perspektif ini, investasi pada pangan sesungguhnya adalah investasi pada stabilitas pembangunan nasional secara keseluruhan. ([World Bank](#))

---

## 8. Kesimpulan

Ketahanan pangan layak disebut sebagai pilar stabilitas ekonomi dan sosial karena ia bekerja pada lapisan paling mendasar dari kehidupan berbangsa. Dari sisi ekonomi, ketahanan pangan membantu menjaga inflasi, melindungi daya beli, menopang konsumsi rumah tangga, mengurangi risiko kemiskinan, dan menstabilkan pendapatan produsen pangan. Dari sisi sosial, ketahanan pangan menentukan rasa aman rumah tangga, kualitas gizi, perkembangan anak, kesehatan masyarakat, kohesi sosial, dan legitimasi kebijakan publik. Dengan demikian, ketahanan pangan bukan sekadar isu sektor pertanian, tetapi fondasi dari tatanan pembangunan yang lebih luas. ([World Bank](#))

Dinamika global memperlihatkan bahwa ancaman pangan tidak bersifat sesaat. Pada 2024 masih ada sekitar 673 juta orang lapar, hampir 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, dan 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. Pada saat yang sama, inflasi pangan masih tinggi di banyak negara dan perubahan iklim terus meningkatkan risiko terhadap sistem pangan. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa pangan harus diperlakukan sebagai isu strategis abad ke-21, setara pentingnya dengan energi, kesehatan, dan keamanan. ([FAOHome](#))

Indonesia memiliki modal untuk memperkuat ketahanan pangannya, terlihat dari peningkatan produksi beras pada 2025, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, serta penguatan cadangan dan intervensi stabilisasi. Akan tetapi, tantangan tetap besar: inflasi pangan, kemiskinan perdesaan, kerentanan iklim, disparitas distribusi, dan kualitas diet masyarakat. Karena itu, agenda ke depan bukan hanya menjaga produksi, melainkan membangun sistem pangan yang tangguh, beragam, bergizi, dan adil bagi produsen maupun konsumen. Ketika

tujuan itu tercapai, ketahanan pangan tidak lagi hanya menjadi agenda teknis, melainkan berubah menjadi salah satu fondasi utama stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

---

## Glosarium

**Ketahanan pangan:** kondisi ketika seluruh penduduk, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. ([World Bank](#))

**Ketersediaan pangan (*availability*):** tersedianya pangan secara fisik melalui produksi, cadangan, impor, dan distribusi. ([World Bank](#))

**Akses pangan (*access*):** kemampuan rumah tangga memperoleh pangan, baik secara ekonomi maupun fisik. ([World Bank](#))

**Utilisasi pangan (*utilization*):** cara pangan dikonsumsi dan dimanfaatkan tubuh, termasuk mutu gizi, keamanan pangan, kesehatan, dan sanitasi. ([World Bank](#))

**Stabilitas pangan (*stability*):** keberlanjutan ketersediaan, akses, dan utilisasi pangan dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi guncangan. ([World Bank](#))

**Inflasi pangan:** kenaikan harga komponen pangan secara berkelanjutan yang menekan daya beli rumah tangga.

**Harga bergejolak (*volatile food*):** kelompok komoditas pangan yang harganya mudah naik turun karena faktor cuaca, musim, pasokan, dan distribusi. ([Bank Indonesia](#))

**Diet sehat:** pola makan yang memadai, beragam, seimbang, dan moderat untuk memenuhi kebutuhan gizi serta mendukung kesehatan.

([FAOHome](#))

**Stunting:** kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan faktor lingkungan yang buruk. ([BKPK](#)

[Kemenkes](#))

**Cadangan Beras Pemerintah (CBP):** stok beras yang dikelola negara untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga serta untuk bantuan pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

**SPHP:** Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yakni program intervensi distribusi beras untuk menahan gejolak harga di pasar. ([Badan Pangan Nasional](#))

**GPIPS:** Gerakan/Program Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis yang diperkuat BI untuk mengintegrasikan penguatan produksi, distribusi, dan pengendalian inflasi pangan. ([Bank Indonesia](#))

**Resiliensi pangan:** kemampuan sistem pangan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan seperti inflasi, bencana, dan perubahan iklim.

**Kerawanan pangan moderat atau berat:** kondisi ketika seseorang atau rumah tangga menghadapi hambatan dalam memperoleh pangan yang cukup dan memadai pada sebagian waktu atau secara serius.

([FAOHome](#))

---

## Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2025, May 27). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%*. ([BKPK Kemenkes](#))

Badan Pangan Nasional. (2025, July 5). *Resmi! Badan Pangan Nasional beri penugasan bantuan pangan beras ke Bulog.* ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, February 4). *Jaga keberlanjutan, pemerintah perpanjang kembali program SPHP beras 2025 hingga akhir Februari 2026.* ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, January 22). *Stok Cadangan Beras Pemerintah bisa tembus 6 juta ton, tidak ada alasan harga melebihi HET.* ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen (y-on-y).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Siaran pers Badan Pusat Statistik.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 30). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 11). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Hunger Map 2025*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)*. ([FAOHome](#))

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis report*.

World Bank. (2023). *What is food security? There are four dimensions*. ([World Bank](#))

World Bank. (2025, January 17). *Food Security Update*.

World Bank. (n.d.). *Food Price Crisis Observatory*. ([World Bank](#))

World Bank. (2011). *Responding to higher and more volatile world food prices*. ([World Bank](#))

World Meteorological Organization. (2026, January 14). *WMO confirms 2025 was one of warmest years on record*. ([World Meteorological Organization](#))

**Versi Artikel Jurnal:**

**KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PILAR STABILITAS  
EKONOMI DAN SOSIAL:**

**Abstract**

This article examines food security as a foundational pillar of economic and social stability, arguing that it should not be treated merely as an agricultural production issue but as a multidimensional systems problem involving availability, access, utilization, and stability over time. The study uses a qualitative literature review and secondary-data approach, drawing on recent evidence from FAO, the World Bank, the IPCC, Indonesia's Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, the National Food Agency, and the Ministry of Health, complemented by selected academic literature on food entitlement, food-price volatility, and political instability. Recent global evidence shows that in 2024 around 673 million people still experienced hunger, roughly 2.3 billion faced moderate or severe food insecurity, and about 2.6 billion could not afford a healthy diet. These data indicate that food insecurity is not merely a supply problem, but also a problem of affordability, distribution, nutrition, and systemic resilience. ([FAOHome](#))

The article finds that food security affects economic stability through inflation control, household purchasing power, poverty dynamics, labor productivity, and the continuity of domestic demand. It also affects social stability through nutrition outcomes, human capital formation, household security, public trust, and the risk of social unrest when food

prices become volatile. In Indonesia, the relevance of this relationship is evident in the strategic role of food prices in shaping inflation, the state's reliance on food stabilization measures, the persistence of rural poverty, and continuing nutritional challenges such as stunting, despite improvements in rice production and public food reserves. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

The article concludes that a durable food-security strategy must move beyond a narrow production-centered paradigm toward a resilient food system that is climate-adaptive, logistically efficient, nutritionally oriented, socially inclusive, and institutionally coordinated. In that sense, food security is not a peripheral welfare concern; it is a strategic condition for macroeconomic resilience, social cohesion, and sustainable national development. ([IPCC](#))

**Keywords:** food security, economic stability, social stability, food inflation, poverty, nutrition, Indonesia

---

## 1. Introduction

Food security occupies a special place in development studies because it intersects biological necessity, economic organization, and political legitimacy. A country may record positive GDP growth, rising investment, or expanding infrastructure, yet if a substantial share of its population struggles to access affordable and nutritious food, such progress becomes socially fragile. The World Bank, drawing on the 1996 World Food Summit definition, states that food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets dietary needs and food preferences for an active and healthy life; this framework rests on four dimensions: availability, access, utilization, and stability. ([World Bank](#))

The urgency of this issue has intensified in recent years. FAO's 2025 *State of Food Security and Nutrition in the World* reports that about 673 million people experienced hunger in 2024, while around 2.3 billion faced moderate or severe food insecurity and about 2.6 billion were unable to afford a healthy diet. FAO further emphasizes that elevated food-price inflation has undermined purchasing power, especially among low-income groups, and has weakened access to nutritious diets. These findings imply that food insecurity can no longer be interpreted merely as insufficient aggregate supply; it is also about affordability, inequality, dietary quality, and resilience under stress. ([FAOHome](#))

For Indonesia, the issue is particularly strategic. Food expenditure continues to occupy a large share of household budgets, especially among lower-income groups, while food prices remain highly visible in public perception and policy debate. BPS reported year-on-year inflation of 4.76 percent in February 2026, and Bank Indonesia has maintained a formal inflation target of  $2.5 \pm 1$  percent for 2026–2027, with volatile-food inflation treated as a central area of coordination. This indicates that food is not simply an agricultural matter; it is an anchor of macroeconomic management. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

At the same time, Indonesia presents a mixed picture of progress and vulnerability. Rice production improved significantly in 2025, poverty declined, and stunting also fell, yet disparities remain across rural and urban areas, logistical inefficiencies persist, and climate-related risks are becoming more serious. The coexistence of stronger production with continuing inflationary and nutritional pressures illustrates a key analytical point: food security must be approached as a system, not as a single production variable. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

This article aims to develop a more formal journal-style argument that food security functions as a pillar of both economic and social stability. The central question is: in what ways does food security shape inflation,

purchasing power, poverty, nutrition, public trust, and social order, especially in the Indonesian context? To answer this, the article adopts an IMRaD structure and combines conceptual discussion with recent secondary evidence from global and Indonesian sources. ([World Bank](#))

---

## 2. Method

This study uses a qualitative literature-review design with analytical synthesis of secondary data. The article does not test a single econometric hypothesis; rather, it builds an interpretive and policy-relevant argument by integrating conceptual literature with recent statistical and institutional evidence. The method is appropriate because the objective is to explain the multidimensional relationship between food security, economic stability, and social stability in a broad national-development framework. ([Universitas Indonesia](#))

The data sources were selected from three groups. First, global and multilateral sources were used to establish conceptual and comparative foundations, including FAO, the World Bank, and the IPCC. Second, Indonesian official sources were used to ground the analysis in current national conditions, especially BPS, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, and Kementerian Kesehatan. Third, selected academic works were included to strengthen causal reasoning, especially those concerning entitlement theory, the food security–growth nexus, food-price volatility, and food-related political instability. ([World Bank](#))

The analysis proceeded in four stages. First, the article identified the accepted multidimensional concept of food security. Second, it mapped global evidence on hunger, food affordability, food-price inflation, and climate-related pressures. Third, it examined Indonesian indicators on inflation, production, poverty, nutrition, and food-policy responses.

Fourth, it synthesized these materials into an argument about why food security should be understood as a macroeconomic and social-stability variable rather than a narrow sectoral concern. ([World Bank](#))

A limitation of this method is that it relies on official statistical releases and published research rather than original fieldwork. As a result, the article is stronger in conceptual integration and policy interpretation than in causal identification at the micro level. Nevertheless, for a journal-style conceptual paper focused on national policy and development strategy, this approach remains valid and useful. ([Universitas Indonesia](#))

---

### **3. Results**

#### **3.1. Food security is multidimensional, not merely about supply**

The first result of this review is conceptual but decisive: food security cannot be reduced to output volume. The World Bank's widely used framework makes clear that food security consists of availability, access, utilization, and stability. This means a country may have adequate aggregate food production and still face food insecurity if households cannot afford food, if diets lack nutritional quality, or if the system collapses when exposed to shocks such as drought, conflict, or inflation. ([World Bank](#))

This broader understanding also aligns with Amartya Sen's entitlement approach, which shifted famine analysis away from aggregate food supply alone toward people's actual command over food through production, exchange, labor, and assets. The conceptual implication remains highly relevant: hunger and food insecurity often arise not simply because food does not exist, but because people lose the means to access it. In policy terms, this helps explain why food security must be

linked to incomes, labor markets, social protection, and price stabilization. ([OUP Academic](#))

### **3.2. Global evidence shows food insecurity remains severe and structurally linked to affordability**

Recent global data demonstrate that the food problem remains large even after the peak disruptions of the pandemic years. FAO reported that around 673 million people experienced hunger in 2024, with progress uneven across regions: improvements occurred in some areas, but hunger continued to rise in much of Africa and Western Asia. The same reporting cycle indicated that around 2.3 billion people faced moderate or severe food insecurity. These findings confirm that the global food system is still under strain and that recovery is regionally unequal.

([FAOHome](#))

The affordability dimension is equally significant. As of 2024, roughly 2.6 billion people still could not afford a healthy diet, according to FAO. This is a critical result because it shows that food insecurity is not only about calories or staple availability. A household may still consume enough basic energy while failing to access diverse, nutritious food necessary for long-term health and productivity. Thus, the affordability of healthy diets is a more advanced and socially relevant indicator than simple staple supply. ([FAOHome](#))

FAO also emphasizes that elevated food-price inflation has had a direct role in worsening food access and nutrition outcomes. Its 2025 report places special focus on how high food-price inflation has reduced purchasing power and restricted access to healthy diets, especially among poorer populations. This implies that food inflation should be understood not merely as a temporary market signal but as a structural transmission channel through which macroeconomic shocks become nutritional and social problems. ([FAOHome](#))

### **3.3. Food security strongly affects economic stability**

The review finds a strong economic channel connecting food security and macroeconomic stability. At the most immediate level, food security affects inflation. The World Bank's January 2025 *Food Security Update* shows that domestic food inflation remained above 5 percent in more than 72 percent of low-income countries, indicating that food prices continue to exert major pressure on welfare and macroeconomic management. When food prices rise sharply, especially in societies where food makes up a large share of household spending, real incomes fall quickly. ([FAOHome](#))

The second economic channel is household demand. When food prices are stable and supply is adequate, households retain fiscal space for education, health, transport, and productive spending. When food prices spike, those budgets are compressed. This is especially important in an economy such as Indonesia's, where domestic consumption remains a principal engine of growth. BPS reported that Indonesia's economy grew by 5.04 percent year-on-year in the third quarter of 2025 and 5.11 percent for full-year 2025, illustrating the continuing importance of demand resilience. Food stability therefore underpins not only social welfare but also the continuity of aggregate demand. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

The third channel concerns production and employment. Food systems are not only about consumption; they are also about livelihoods. In Indonesia, agriculture, forestry, and fisheries added around 0.49 million workers in the year up to August 2025, according to BPS reporting. This shows that food security has dual economic significance: it sustains consumers through affordable food and sustains producers through income generation. A food system failure therefore has two-sided economic costs. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

The literature also supports a broader link between food security and economic growth. Fernandes and Samputra's systematic mapping review concludes that food security and economic growth are interrelated and often mutually reinforcing. The argument is not that growth automatically solves food insecurity, but that policies treating food security and growth as separate domains are analytically incomplete. Stable food systems support labor productivity, public health, and social order, all of which affect growth performance. ([Universitas Indonesia](#))

### **3.4. Food security strongly affects social stability**

The social channel is no less important. Food insecurity directly affects household security, stress, and public trust. When people are uncertain about their ability to feed their families, the result is not only nutritional deprivation but also social anxiety and political sensitivity. The World Bank's Food Price Crisis Observatory explicitly tracks food-riot incidents and describes how food price instability can be associated with episodes of social unrest. That institutional choice reflects a widely recognized reality: unstable food systems can generate broader instability. ([World Bank](#))

Academic research reinforces this connection. Bellemare's study on rising food prices and social unrest finds a significant association between food-price increases and the incidence of unrest, while Soffiantini's work on the Arab Spring shows that food insecurity interacted with pre-existing social tensions and contributed to political instability in several countries. Similarly, an IMF working paper by Arezki and Brückner finds that in low-income countries, increases in international food prices were associated with weaker democratic institutions and more antigovernment demonstrations, riots, and civil conflict. These findings do not mean that food prices alone cause unrest, but they do show that food insecurity can act as a powerful amplifier of fragility. ([Wiley Online Library](#))

Another crucial social pathway concerns nutrition and human capital. FAO's 2025 reporting emphasizes that access to nutritious and diverse diets remains inadequate, especially for women and children. This matters because food security is not only about preventing hunger today; it is about protecting cognitive development, health, and productivity tomorrow. Nutrition failures in childhood are eventually translated into lower educational performance, reduced labor productivity, and wider inequality. ([FAOHome](#))

### **3.5. Indonesia shows both significant progress and persistent fragility**

Indonesia's recent data illustrate the complexity of food security. On the supply side, BPS reported that harvested paddy area in 2025 reached about 11.32 million hectares and paddy production rose to around 60.21 million tons GKG, with rice production for food consumption increasing as well. This represents substantial progress relative to 2024 and indicates that, at least on aggregate output, Indonesia strengthened its food-production base in 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

However, output growth alone did not remove macroeconomic pressure. BPS reported annual inflation of 4.76 percent in February 2026. Bank Indonesia, in parallel, reaffirmed that overall inflation for 2026–2027 is expected to remain within the  $2.5 \pm 1$  percent target range and explicitly highlighted the management of food and regional supply as part of its stabilization efforts. This suggests that food security is not secured by harvest data alone; distribution, expectations, seasonal demand, and price transmission remain decisive. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

On the social side, Indonesia also shows mixed outcomes. BPS reported that poverty declined to 8.25 percent in September 2025, but rural poverty remained significantly higher than urban poverty. This is a major structural issue because rural areas are central to food production. In other words, the households producing food are still more vulnerable

than urban households on average. Such a condition can weaken long-term food resilience if producers themselves remain economically fragile.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Nutritional indicators tell a similar story. The Ministry of Health reported that national stunting prevalence fell to 19.8 percent in 2024, which is clear progress relative to the previous year. Yet the level remains high enough to indicate persistent nutritional inequality and continuing challenges in maternal-child nutrition, dietary quality, and the integration of food policy with health policy. A country can strengthen staple availability while still facing serious deficits in the quality of nutrition. ([BKPK Kemenkes](#))

### **3.6. Indonesia's policy response confirms the strategic status of food security**

Indonesian policy responses in 2025–2026 show that the state already treats food as a strategic stability variable. Bank Indonesia launched GPIPS as a strengthened strategy linking food security and inflation control, emphasizing short-term price stabilization, improved regional connectivity and supply distribution, and stronger risk management in the face of weather and seasonal pressures. This is analytically important because it formalizes the idea that food stability and inflation management are inseparable. ([Bank Indonesia](#))

Badan Pangan Nasional has also relied on food reserves and social distribution instruments. It reported that the SPHP rice program was extended through the end of February 2026, with sales realization reaching around 902.7 thousand tons by 31 January 2026. The same institution also reported large-scale rice-assistance distribution in 2025 covering 18,277,083 beneficiaries, with 10 kilograms per beneficiary per month for two months. These measures function as short-term stabilizers: they help contain food inflation, maintain household

purchasing power, and reduce the probability that market stress escalates into a welfare crisis. ([Badan Pangan Nasional](#))

Public reserves are another essential component. Badan Pangan Nasional stated in January 2026 that government rice reserves had reached around 3.3 million tons and could climb further during the year. The importance of such reserves lies not only in physical stock but also in policy credibility. Markets behave differently when the state has credible capacity to intervene. Thus, reserves serve both material and expectation-management functions. ([Badan Pangan Nasional](#))

---

## **4. Discussion**

### **4.1. Why food security should be treated as a macro-social stabilizer**

The synthesis above suggests that food security should be reclassified in policy thinking: it is not merely an agricultural outcome, but a macro-social stabilizer. Economically, it helps restrain inflation, protect real incomes, sustain consumption, and preserve the viability of producer livelihoods. Socially, it reduces household insecurity, supports nutrition and human capital, and lowers the likelihood that price shocks trigger broader unrest. This interpretation is strongly supported by both current institutional data and the academic literature on food prices, entitlement failures, and instability. ([World Bank](#))

This broader interpretation is especially important for Indonesia because of its demographic scale, archipelagic geography, and continuing rural-urban inequality. A food system can appear “successful” at the national aggregate level while still failing in remote regions, among poorer households, or in nutritional outcomes. Therefore, the correct analytical lens is not “How much rice was produced?” but “How resilient,

accessible, nutritious, and equitable is the food system?" ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

#### **4.2. Climate change makes food security a resilience problem**

Climate change intensifies the strategic importance of food security. The IPCC states with high confidence that climate change has already reduced food security and affected water security, while also slowing agricultural productivity growth in many regions. FAO and IPCC materials further show that food systems are increasingly exposed to droughts, floods, heat stress, and harvest instability. This transforms food policy into resilience policy: countries must design systems capable not only of performing in normal years but of absorbing shocks. ([IPCC](#))

For Indonesia, this means that future food strategy cannot be limited to production targets. It must include climate-adaptive seed varieties, irrigation efficiency, post-harvest management, regional connectivity, forecasting systems, and better risk management for farmers. Bank Indonesia's recent emphasis on climate and seasonal risks in food-inflation management reflects precisely this shift from static supply thinking to dynamic resilience thinking. ([Bank Indonesia](#))

#### **4.3. Policy implications for Indonesia**

The first policy implication is that food-security policy should adopt a systems approach. Production remains important, but it must be integrated with logistics, reserves, pricing institutions, social protection, and nutrition policy. The evidence reviewed here shows that aggregate production gains do not automatically eliminate inflationary stress or nutritional deficits. Therefore, governance quality becomes as important as output growth itself. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

The second implication is that affordability of healthy diets should become a central performance measure. FAO's 2025 findings on the 2.6 billion people unable to afford healthy diets show why a narrow staple-

centered lens is insufficient. Indonesia's policy architecture would benefit from moving beyond staple sufficiency toward more explicit attention to protein, fruits, vegetables, and local-food diversification. This is relevant not only for health but for regional economic development and risk diversification. ([FAOHome](#))

The third implication is that social protection should be treated as part of food-system design rather than as an emergency afterthought. Indonesia's rice-assistance programs and SPHP interventions illustrate how targeted state action can stabilize vulnerable households. The entitlement perspective also supports this logic: when people lose exchange power, ensuring food access becomes as important as ensuring food existence. ([Badan Pangan Nasional](#))

The fourth implication is that rural producer resilience must be prioritized. Persistent rural poverty means that the producers sustaining national food supply remain structurally exposed. If the state wants durable food security, it must strengthen farmers' income resilience through infrastructure, financing, risk protection, market access, and productivity improvements. Otherwise, national food security will continue to rest on a socially fragile production base. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

#### **4.4. Limitations and scope for further research**

This article is intentionally synthetic and policy-oriented. It does not estimate the causal effect of particular food-policy instruments on inflation or poverty, nor does it model regional disparities at the provincial level. Future research could extend this work through panel-data analysis across Indonesian provinces, household-level expenditure studies, or mixed-method research on how food insecurity shapes trust and social cohesion in different communities. ([Universitas Indonesia](#))

Even so, the evidence assembled here is sufficient to support a central conclusion: food security deserves to be treated as a strategic variable for development planning, macroeconomic stabilization, and social policy integration. In a period of climate volatility, uneven growth, and global uncertainty, food security is increasingly synonymous with national resilience. ([FAOHome](#))

---

## 5. Conclusion

This article has shown that food security is best understood as a multidimensional condition linking food availability, access, utilization, and stability. It is not merely a sectoral issue of agricultural output, but a systemic condition shaping inflation, purchasing power, poverty, nutrition, public trust, and social order. Global evidence from FAO demonstrates that hunger, food insecurity, and the unaffordability of healthy diets remain widespread, while climate change and food-price inflation continue to intensify risk. ([World Bank](#))

The Indonesian case confirms the same logic. Recent gains in rice production, declining poverty, and lower stunting are encouraging, yet inflationary pressure, rural vulnerability, and nutritional inequality remain important constraints. State responses through inflation coordination, reserves, SPHP, and food assistance show that food security is already being treated as a practical policy lever of stability. The challenge now is to make that approach more integrated, more nutrition-sensitive, more climate-adaptive, and more just for both consumers and producers. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

In that sense, food security is not a peripheral welfare issue. It is one of the deepest foundations of stable development. A country may aspire to industrial upgrading, digital transformation, and long-term

competitiveness, but without a resilient, affordable, and nutritious food system, those ambitions stand on unstable ground. Food security, therefore, is not simply about feeding a nation; it is about stabilizing the nation's economy, strengthening its society, and securing its developmental future. ([World Bank](#))

---

## References

Arezki, R., & Brückner, M. (2011). *Food prices and political instability* (IMF Working Paper No. 11/62). International Monetary Fund. ([IMF](#))

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2025, May 27). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%*. ([BKPK Kemenkes](#))

Badan Pangan Nasional. (2025, July 5). *Resmi! Badan Pangan Nasional beri penugasan bantuan pangan beras ke Bulog*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2025, July 14). *Bantuan pangan beras mulai salur hari ini, penyangga ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, February 4). *Jaga keberlanjutan, pemerintah perpanjang kembali program SPHP beras 2025 hingga akhir Februari 2026*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG)*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 5). *Bank Indonesia luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2025.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 11). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 26). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas.* ([Bank Indonesia](#))

Bellemare, M. F. (2015). Rising food prices, food price volatility, and social unrest. *American Journal of Agricultural Economics*, 97(1), 1–21.  
<https://doi.org/10.1093/ajae/aau038> ([Wiley Online Library](#))

Fernandes, M., & Samputra, P. L. (2022). Exploring linkages between food security and economic growth: A systematic mapping literature review. *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences*, 16, 206–218.  
<https://doi.org/10.5219/1734> ([Universitas Indonesia](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *Hunger declines globally, but rises in Africa and western Asia.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *SOFI 2025: FAO calls for urgent, coordinated and inclusive action to end global hunger.* ([FAOHome](#))

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report. Summary for policymakers.* ([IPCC](#))

Sen, A. (1981/1983). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation.* Oxford University Press. ([OUP Academic](#))

Soffiantini, G. (2020). Food insecurity and political instability during the Arab Spring. *Global Food Security*, 26, 100400.

<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100400> (ScienceDirect)

World Bank. (2023). *What is food security? There are four dimensions.*

(World Bank)

World Bank. (2025, January 17). *Food security update.* (FAOHome)

World Bank. (n.d.). *Food price crisis observatory.* (World Bank)

World Bank. (2014). *Food riots: From definition to operationalization.*

(World Bank)

---

---

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 11 Maret 2026

Prompting on Writer's account (Rudy C Tarumingkeng )

<https://chatgpt.com/c/69129df8-12fc-8322-99e8-d3c683bbf9c4>